

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan kerjasama ini diawali dengan pertemuan antara satu pihak dengan pihak lainnya (mitra kerja) untuk membicarakan tentang kerja sama yang akan dilakukan. Maka dari itu untuk dapat mempertahankan eksistensi sebuah perusahaan, perusahaan itu haruslah dapat memperluas jaringan dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Yang tujuannya tidak lain untuk membantu aktivitas-aktivitas dalam sebuah perusahaan dan dengan adanya kerjasama, sebuah perusahaan akan dapat berkembang secara cepat. Melalui hubungan kerjasama inilah perusahaan akan dapat memperoleh manfaat-manfaat dari setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mitra kerjanya. (Hernoko,2008)

Kerjasama dengan mitra kerja pada sebuah perusahaan sangat erat hubungannya dengan kelancaran aktivitas perusahaan, sebab dengan adanya jalinan kerjasama sebuah perusahaan dengan mitra kerja ini, akan membawa sebuah perusahaan ke dalam kesuksesan. Perusahaan bisa mencapai sukses jika didukung dan mendukung mitra kerjanya. Intinya kesuksesan dalam sebuah perusahaan dapat diraih melalui kerja sama dengan mitra kerja. Pentingnya prosedur dan sistem dalam pelaksanaan kerjasama, agar kegiatan kerjasama dapat direncanakan dan dilaksanakan tersusun secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya.

Dalam mencapai tujuan pada suatu lembaga pemerintahan membutuhkan keterikatan kerjasama dari pihak lain, seperti pada dinas pemerintahan umum membutuhkan jasa konsultan

dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Menurut peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada beberapa metode pemilihan penyedia jasa konsultan :

1. Seleksi

- a. Seleksi umum : secara prinsip penyedia pemilihan jasa konsultan menggunakan metode ini, kecuali memenuhi kriteria untuk dapat menggunakan metode pemilihan penyedia jasa konsultan lainnya.
 - b. Seleksi sederhana : bersifat sederhana dan nilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Penunjukan Langsung, (Perpres RI No. 54 Tahun 2010 pasal 44).
3. Pengadaan langsung, nilai maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan kebutuhan operasional.
4. Sayembara, merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Berdasarkan paparan singkat diatas seharusnya lembaga pemerintahan harus membuat sistem dan prosedur yang sistematis dan jelas, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian serta mengetahui dan mempelajari lebih jauh tentang **“Sistem dan Prosedur Kerjasama Dengan Konsultan Pada Dinas Prasarana Jalan,Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas akan diuraikan, beberapa hal berikut :

- a. Bagaimana sistem kerjasama dengan konsultan Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat ?

- b. Bagaimana prosedur pemilihan penyediaan jasa konsultansi yang berbentuk perorangan dan badan usaha pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam melaksanakan kegiatan magang ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :

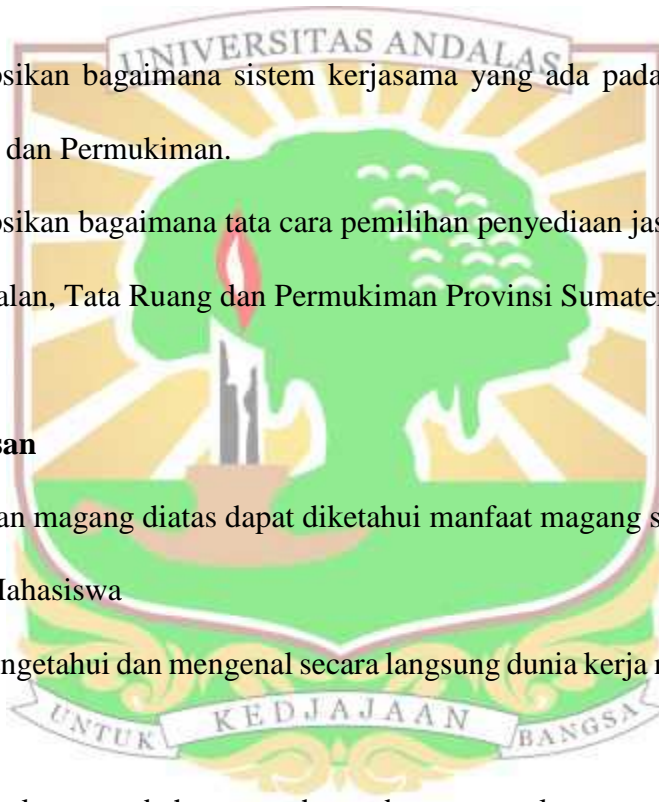
1. Mendeskripsikan bagaimana sistem kerjasama yang ada pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman.
2. Mendeskripsikan bagaimana tata cara pemilihan penyediaan jasa konsultan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan magang diatas dapat diketahui manfaat magang sebagai berikut :

a) Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada saat sekarang ini.
2. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang hubungan kerjasama
3. Membantu dan melatih cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan kerja.



b) Bagi Universitas

1. Menciptakan sumberdaya manusia dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja nyata.
2. Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan atau perguruan tinggi dan dunia kerja.
3. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi di dunia kerja.

c) Bagi Instansi

1. Terbantunya instansi melalui sumbangan tenaga dan pikiran.
2. Dapat memberikan masukan apabila terjadi permasalahan tentang kerjasama dengan mitra kerja pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d 26 Februari 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini yaitu landasan teori mengenai hal-hal dan teori yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Kerjasama dengan Konsultan pada Departemen Pekerjaan Umum.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran perusahaan tempat kegiatan magang dilakukan. Selain itu pada bab ini juga mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi serta susunan struktur organisasi dan bagaimana aktivitas dalam organisasi tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari permasalahannya, akan membicarakan mengenai sistem dan prosedur kerjasama dengan konsultan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan kegiatan magang dan dilengkapi dengan saran yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

